

Evaluasi Pelaksanaan Tata Kelola Kampanye, Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2018 di Kota Padang Panjang, Kota Pariaman dan Kota Padang

Nabella

Public Administration Master Program
FIS Universitas Negeri Padang
Email: nabella033@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilatar belakangi dengan belum berjalan optimal pelaksanaan tata kolola pemilihan kepala daerah pada tahun 2018 terutama pada pelaksanaan tata kelola kampanye, pemungutan dan penghitungan suara di Kota Padang panjang, Kota Pariaman, dan Kota Padang, karena masih terjadi permasalahan yaitu Administrasi data pemilih kurang akurat, kurangnya netralitas penyelenggara, partisipasi pemilih masih rendah, kampanye diluar jadwal, dan alat peraga kampanye yang tidak sesuai aturan. Tujuan penelitian ini untuk mengevaluasi pelaksanaan tata kelola kampanye, pemungutan dan penghitungan suara pada pemilihan kepala daerah tahun 2018 di Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, dan Kota Padang.

Jenis penelitan ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif, informan penelitian ditentukan secara *Purposive Sampling*. Data dikumpulkan melalui wawancara, dan studi dokumentasi. Uji keabsahan data dilakukan melalui triangulasi metode dan triangulasi sumber. Teknik analisis data menggunakan 2 (dua) cara yaitu menggunakan Analisis SWOT dan menggunakan Analisis data kualitatif melalui tahap pengelolaan data, Reduksi data, Penyajian data, dan Penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan tata kelola pemilihan kepala daerah serentak tahun 2018, belum berjalan maksimal masih terdapat permasalahan. Dalam pelaksanaan tata kelola kampanye yaitu dikarenakan rendahnya regulasi yang ada, kurangnya pengawasan dari bawaslu pada saat kampanye, kurangnya kepatuhan peserta pilkada dalam Pemasangan Alat peraga kampanye dan Bahan Kampanye tidak sesuai dengan keinginan pasangan calon, dan masih banyak terjadi Kampanye tanpa pemberitahuan. Didalama pelaksanaan tata kelola pemungutan dan penghitungan suara masih terjadi permasalahan yaitu Ketidak Netralan ASN pada masa Pilkada, Penyelenggara KPPS tidak professional dalam melaksanakan tugas, DPT yang masih belum akurat walaupun sudah menggunakan sistem SIDALIH.

Kata Kunci : Pemilihan Kepala Daerah, Tata Kelola, Kampanye, Pemungutan dan Penghitungan Suara